

Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Kasus Relokasi Rempang, Kota Sejarah Melayu di Batam

Marliana Gracia Galilea Saragih¹, Razie Razak²

¹ Hubungan Masyarakat Digital, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, marlianagracia@student.telkomuniversity.ac.id

² Hubungan Masyarakat Digital, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, razierazak@telkomuniversity.ac.id

Abstract

The Rempang Eco City project was initiated in 2004 through a collaborative effort between the Government of Indonesia and the Batam Concession Agency (BP Batam). It is scheduled for completion in 2023. Rempang Island will undergo a transformation into an integrated industrial, trade and tourism area. Nevertheless, the project encountered opposition from the indigenous population of Rempang. The indigenous community was uncooperative with the proposed relocation plan, which led to a conflict between the indigenous community and the Indonesian government. The existence of resistance from the community against the government demonstrates that the government has not managed this crisis effectively through the use of appropriate communication strategies. The author's primary concern is the analysis of the content of press conference messages during the Rempang relocation crisis. The objective of this research is to analyse the content of the press conference message during the Rempang relocation crisis by observing the opening, content, and closing of the press conference. The research was conducted using a qualitative approach and employed Charles Sanders Peirce's semiotics method, which focuses on the analysis of the trichotomy of signs, comprising the representamen, object, and interpretant. The findings revealed that the crisis communication conducted by the Government of Indonesia through the spokesperson, Bahlil Lahadalia, was executed through three communication levels: the opening, content, and closing of the press conference.

Keywords-crisis communication, indigenous peoples, press conference, Rempang, relocation

Abstrak

Proyek Rempang Eco City ini sudah dicanangkan sejak tahun 2004 melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan baru terealisasi di tahun 2023. Pulau Rempang nantinya akan dialihkan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi. Namun, proyek ini mendapatkan resistensi dari masyarakat adat Rempang. Masyarakat adat menolak untuk direlokasi, resistensi tersebut memicu konflik antar masyarakat adat dengan Pemerintah Indonesia. Adanya perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan pemerintah belum menangani krisis ini dengan komunikasi yang tepat. Masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana analisis isi pesan konferensi pers ketika krisis relokasi Rempang berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah isi pesan konferensi pers pada krisis relokasi Rempang yang berlangsung melalui pengamatan pembukaan, isi, dan penutupan konferensi pers. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode Semiotika Charles Sanders Peirce yang berfokus pada analisis trikotomi tanda yang meliputi representamen, objek, dan interpretan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi krisis yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui spokesperson, Bahlil Lahadalia dijalankan melalui tiga level komunikasi yakni pembukaan, isi, dan penutupan konferensi pers.

Kata Kunci-komunikasi krisis, konferensi pers, masyarakat adat, Rempang, RELOKASI

I. PENDAHULUAN

Proses menyampaikan informasi dengan tujuan menjelaskan suatu krisis merupakan definisi dari komunikasi krisis (Syam et al., 2022). Pemerintah mengelola komunikasi krisis dengan memberikan persepsi yang sesuai dengan realitas atau kenyataan, dalam hal ini memberi tahu masyarakat mengenai apa yang terjadi. Komunikasi krisis merupakan cara atau skema untuk mengurangi kerusakan reputasi suatu pemerintah atau organisasi. Meskipun kajian komunikasi krisis telah dikaji oleh banyak akademisi, tetapi kiranya bidang keilmuan ini masih memiliki landasan sosiologis yang belum begitu kuat. Dikatakan demikian karena sejauh ini masih minim sekali elaborasi pemikiran terkait dengan konsep dasar sosial; seperti risiko, kepercayaan, konflik, opini publik, media massa, media sosial atau bahkan komunikasi dalam pembahasannya.

Peran komunikasi krisis adalah agar dapat menciptakan persepsi publik selaras dengan realitas. Dalam hal terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakatnya diperlukan adanya komunikasi yang baik agar konflik tidak melebar. Penyampaian komunikasi yang tidak baik yang terjadi antara pemerintah dengan warga negaranya pernah terjadi dalam beberapa kasus. Kasus terbaru yang terjadi adalah warga Pulau Rempang. Masyarakat yang sudah mendiami Pulau Rempang sejak lama, kini harus menyerahkan tanah adat yang mereka diami-akan digusur karena proyek dari pengembangan pembangunan Pulau Rempang yaitu Rempang Eco City. Pemerintah Indonesia berdalih bahwa masyarakat Rempang akan direlokasi bukan digusur dari tanah adat mereka.

Rempang Eco City ialah proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang di Kota Batam. Proyek pengembangan pulau Rempang ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG). Tujuan dari proyek pembangunan ini akan dijadikannya Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, sampai wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan negara Singapura serta Malaysia. Selain itu proyek ini juga bertujuan untuk menarik wisatawan dari Singapura, letak dari Pulau Rempang yang strategis bisa dicapai pada waktu yang singkat dari Singapura. Di lansir dari halaman website tempo.co, status dari proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) semenjak Agustus 2023 lalu, menyebabkan proyek ini berjalan dengan cepat dimulai dari BP Batam yang melakukan proses pemasangan patok dan pengukuran lahan di Pulau Rempang pada Kamis, 7 September 2023. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlawanan dari masyarakat Pulau Rempang yang menolak digusur serta direlokasi. Konflik terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan gabungan.

Adanya perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan pemerintah belum menangani krisis ini dengan komunikasi yang tepat. Komunikasi krisis menjadi panduan dalam menyampaikan respons secara cepat begitu krisis terjadi, melalui pesan yang terbuka dan jujur pada para pemangku kepentingan (stakeholder) (Prastya, 2011). Dengan begitu seharusnya pemerintah dapat menangani kasus ini dengan tanggap, tetapi malah yang didapatkan oleh masyarakat Rempang adalah pengabaian hak dan suara mereka. Pemerintah kerap kali mengabaikan aspirasi masyarakat daerah untuk mempertahankan tanah adat dengan alasan pembangunan yang spektakuler dengan menggunakan media massa sebagai corong pemerintah untuk pembenaran (Baun, 2022). Media massa cenderung menampilkan spokesperson atau juru bicara dari pemerintah yang terdiri dari menteri, gubernur, Walikota, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Kapolda), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui spokesperson atau juru bicaranya yaitu Bahlil Lahadalia melakukan dialog dengan masyarakat Rempang. Pemerintah Indonesia berkomunikasi terhadap kasus ini adalah dengan melakukan konferensi pers yang diwakili oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia pada 25 September lalu. Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai juru bicara dari pemerintahan terkait permasalahan relokasi Rempang ini.

Melalui penelitian-penelitian yang telah ada, masih segelintir penelitian yang membahas mengenai komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus pemindahan atau pengusuran masyarakat dari tanah adat yang mereka diami sejak lama. Penelitian yang dilakukan di internasional juga tidak banyak membahas tentang komunikasi krisis pemerintah terhadap pemindahan tanah atau tempat tinggal masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah negara lain tidak bertangan besi seperti Pemerintah Indonesia. Penelitian terkait komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus pengusuran masyarakat dari tanah adatnya perlu dilakukan untuk melihat apakah pemerintah masih mengabaikan aspirasi dan suara dari masyarakat dan apakah dengan menggunakan spokesperson atau juru bicara sebagai perwakilan dari pemerintahan dapat menangani kasus-kasus seperti ini dengan baik.

Maka dari itu, penelitian ini melihat dari aspek serta kajian semiotika Charles Sanders Peirce untuk menemukan tanda dan makna dari isi pesan konferensi pers pada krisis relokasi Rempang. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik yakni, pengumpulan data primer yang berasal dari konferensi pers "Percepatan

Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” yang disiarkan langsung pada tanggal 25 September melalui kanal Youtube Kementerian Investasi – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dari berbagai macam sumber yakni penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta artikel. Intensi penelitian ini adalah melihat tanda-tanda dari kalimat yang dilontarkan oleh Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” sehingga dapat diketahui bagaimana analisis isi pesan konferensi pers Ketika krisis relokasi Rempang berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul “Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Relokasi Rempang, Kota Sejarah Melayu di Batam”.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Komunikasi Krisis

Metode menyampaikan informasi dengan tujuan menjelaskan suatu krisis adalah pengertian dari komunikasi krisis menurut Syam et al., (2022:15). Sedangkan, menurut Coombs Sherry (2010) (Silviani, 2020:125), komunikasi krisis adalah pengumpulan, pengolahan, serta penyebaran informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu krisis. Dalam jangka waktu yang lama krisis akan semakin memuncak, maka dari itu diperlukan komunikasi dalam menanganinya. Peranan komunikasi dalam sebuah krisis terbilang krusial karena instansi atau Perusahaan memerlukan hal tersebut untuk menyampaikan informasi dalam krisis yang sedang terjadi. Teori komunikasi yang berhubungan dekat dengan situasi krisis termasuk krisis bencana adalah teori komunikasi situasional (*Situational Crisis Communication Theory*) atau SCCT W. Timothy Coombs.

1. Teori Komunikasi Krisis Situasional

Teori ini menekankan bahwa organisasi harus menanggapi krisis atau peristiwa tak terduga yang mengancam reputasi perusahaan dan keselamatan para *stakeholders* dan publik. Menurut Coombs dalam merespons krisis terdapat empat strategi yang bisa dilakukan (Andung et al., 2023):

a. Strategi penyangkalan (*denial strategies*)

Strategi ini digunakan untuk membantah keterkaitan antara krisis yang terjadi dengan organisasi.

b. Strategi pengurangan (*diminishment strategies*)

Strategi yang dilakukan adalah mengurangi atribusi terhadap organisasi atas krisis yang terjadi.

c. Strategi *rebuilding*

Strategi ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan reputasi organisasi dan juga memperlihatkan rasa tanggung jawab dari krisis yang terjadi.

d. Strategi penguatan

Strategi ini digunakan untuk membangun hubungan positif antara organisasi dengan mitra atau pemangku kepentingan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui komunikasi krisis yang terjadi dalam penanganan kasus relokasi Pulau Rempang oleh Pemerintah Indonesia. Relokasi Pulau Rempang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat adat setempat. Penolakan tersebut berujung pada perlawanan masyarakat adat terhadap pemerintah. Untuk menangani krisis ini Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengadakan konferensi pers dengan Bahlil Lahadalia sebagai perwakilan *spokesperson* atau juru bicara Pemerintah Indonesia.

B. Semiotika Charles Sanders Peirce

Ilmu yang menelaah perihal metode pengkajian tanda ialah semiotika (Sobur, 2016). Lahirnya semiotik berasal dari pemikiran filsuf Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce. Peirce beranggapan bahwa manusia hanya bisa berpikir melalui tanda (Arisanti, 2019). Semiotika Charles Sanders Peirce dikenal dengan model triadic atau teori segitiga makna yang terdiri dari:

1. *Repsentament/Sign* (tanda)

Representamen atau tanda mempunyai arti bahwa tanda tersebut mempresentasikan dalam bentuk sesuatu dan memiliki fungsi sebagai tanda.

2. *Object* (hal yang dirujuk)
Sesuatu yang mengarah pada hal-hal dibalik tanda tersebut.
3. *Interpretant* (hasil dari representamen dengan objek)
Interpretan mengarah kepada makna dari tanda itu sendiri.

Charles Sanders Peirce kemudian memecah menjadi tiga bagian berdasarkan tandanya, yakni:

1. *Qualisign*
Tanda dilihat berdasarkan suatu sifat, seperti warna merah dapat diartika sebagai cinta, bahaya atau larangan.
2. *Sinsign*
Tanda dilihat berdasarkan bentuk atau rupa di dalam kenyataan. Contohnya jeritan dapat diartikan dengan senang atau kesakitan.
3. *Legisign*
Tanda dilihat berdasarkan suatu peraturan yang berlaku umum. Contohnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Kemudian berdasarkan objek, Peirce memilah menjadi tiga bagian, yakni:

1. *Icon*
Tanda yang menyerupai benda yang diwakilinya.
2. *Symbol*
Tanda ditentukan oleh peraturan yang berlaku umum atau ditentukan oleh kesepakatan Bersama
3. *Index*
Tanda mempunyai kaitan atau kedekatan dengan napa yang diwakilinya.

Terakhir, Peirce memilah menjadi tiga bagian berdasarkan interpretan, yakni:

1. *Rheme or seme*
Makna tanda dapat berbeda-beda sesuai tafsiran masing-masing penerima tanda.
2. *Dicent or decisign*
Tanda menyampaikan keadaan sesuai dengan realitas atau kenyataannya.
3. *Argument*
Tanda menyampaikan argumentasi atau keterangan mengenai objek secara langsung.

C. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan adalah sebuah penyampaian ide, gagasan, informasi, isi pikiran/ Pernyataan dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Sedarmayanti, 2018). Komunikasi pemerintahan adalah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakatnya untuk menyampaikan informasi, gagasan, serta program pemerintah untuk masyarakat. Komunikasi pemerintahan bukan hanya sebagai sebuah media untuk pemerintah menyampaikan informasi terkait suatu aturan khayalak, namun sebagai alat untuk mengkoordinasikan sebuah aktivitas secara sistematis dalam melahirkan sebuah kerjasama selain itu informasi yang disampaikan oleh pemerintahan akan memberikan tanggapan atau respons dari khalayak baik stigma positif maupun

negative (Pratiwi et al., 2021). Posisi komunikator dan komunikan dapat berbalik, maka dari itu disinilah komunikasi berguna dalam menyampaikan pesan.

D. *Government Public Relation*

Cutlip dkk mengartikan hubungan masyarakat sebagai fungsi manajemen yang membuat serta memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat (Nova, 2009). Humas memakai komunikasi dua arah dengan tujuan menghasilkan serta memelihara hubungan yang baik antara hubungan masyarakat tersebut serta juga organisasi dalam hal ini pemerintah serta masyarakat. Fungsi Humas dalam sebuah instansi ialah ujung tombak pembangun citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis (Lani & Handayani, 2021). Sebuah kepercayaan didapatkan dari tanggung jawab seorang praktisi Humas yang menjadi saluran arus komunikasi antara organisasi/instansi dengan publik/khalayak. Peran Humas pemerintahan sekarang tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendukung dalam kesuksesan pelaksanaan program pemerintah serta Humas harus dapat membangun reputasi kinerja pemerintahan yang baik di mata Masyarakat (Lani & Handayani, 2021).

E. Kota Sejarah Melayu di Batam

Pulau Rempang merupakan bagian dari sebuah pulau dari wilayah pemerintahan Kota Batam. Pulau Rempang dikenal sebagai kota sejarah Melayu yang sudah ada semenjak abad ke -19 atau kurang lebih tahun 1834. Suku Melayu Galang, Orang Darat, dan Orang Laut adalah tiga suku asli yang sudah menempati pulau tersebut sejak awal. Ada sebuah artikel yang berjudul “Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang” atau “Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang” yang diterbitkan pada 04 Februari 1930. Artikel tersebut merupakan bukti dari kunjungan awal Belanda ke Pulau Rempang. Dalam keterangan manuskrip Belanda berjudul *De Orang Benoea's of Wilden op Malaka in 1642* dalam “*Joernal of the Indian Archipelago*” karya Newbold 1849 berjudul “*Account of Malaka*”, masyarakat Pulau Rempang serupa dengan penduduk di wilayah Malaysia. Catatan tersebut menyebutkan bahwa penduduk Pulau Rempang disebutkan sebagai suku asli pulau tersebut (Ayuningmas et al., 2023). Kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Rempang telah menduduki pulau tersebut jauh di bawah tahun 1840-an, sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat Rempanglah penduduk asli pulau tersebut.

F. Gaya Komunikasi

Setiap manusia yang melakukan komunikasi pasti mempunyai ciri khas, ciri khas tersebut dapat berupa kepribadian yang ada di dalam diri manusia dan sulit untuk diubah (Susetya, 2020). Inilah yang disebut dengan gaya komunikasi. Menurut Liliweri (2011:308), gaya komunikasi adalah suatu kepribadian manusia yang sudah menyatu di dalam diri seseorang sehingga sukar berubah. Hal inilah yang membuat gaya komunikasi setiap orang bersifat personal dan khas. Pengaruh gaya komunikasi dalam sebuah hubungan antar manusia cukup vital karena gaya komunikasi tersebut dapat memperlihatkan kepribadian manusia secara tidak langsung. Steward L. Tubbs serta Sylvia Moss dalam (Martianto & Toni, 2021) berpendapat bahwa ada enam tipe gaya komunikasi seseorang pemimpin, yakni:

1. *Controlling Style* (Gaya Mengendalikan)

Gaya ini ditandai dengan gaya komunikasi yang mengendalikan, membatasi, memaksa, dan mengatur gerak-gerik seseorang demi mencapai kehendak pribadi.

2. *Equalitarian Style* (Gaya Kesetaraan)

Pesan yang disebarkan (Verbal & Non-verbal) bersifat dua arah dengan memperhatikan kesetaraan.

3. *Structuring Style* (Gaya Berstruktur)

Structuring Style lebih memanfaatkan pesan-pesan verbal baik pada lisan maupun tulisan dengan intensi mengutamakan pesan yang disampaikan pemberi pesan kepada penerima pesan.

4. *Dynamic Style* (Gaya Dinamis)

Sifat dari gaya komunikasi ini adalah agresif, karena pemberi pesan akan mendorong atau merangsang penerima pesan agar tergugah dan bergerak dengan cepat dalam merespon pesan.

5. *Relinquishing Style* (Gaya Pelepasan)

Kunci dari gaya komunikasi ini adalah transparansi. Transparansi tanpa adanya paksaan serta juga lebih kepada penerimaan saran, pendapat, atau gagasan dari orang lain.

6. *Withdrawal Style* (Gaya Menarik Diri)

Gaya komunikasi ini mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya dorongan untuk berkomunikasi antara pemberi dan penerima pesan. Hal ini disebabkan oleh factor masalah personal dari setiap pihak yang tidak ingin menghadapi permasalahan tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan paradigma interpretif yang menekankan pada aksi sosial yang bermakna, makna yang dibuat secara sosial serta relativisme nilai (Rorong, 2020). Paradigma ini melihat suatu makna dari banyak sisi dan setiap sisi mempunyai maknanya masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menyampaikan bahwa penelitian ini berupaya untuk menemukan serta menggambarkan secara deskriptif kegiatan yang dilakukan serta akibat dari tindakan yang dilakukan (Anggito & Setiawan, 2018). Untuk menganalisis komunikasi krisis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kasus relokasi Pulau Rempang, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Semiotika Charles Sanders Peirce adalah ilmu yang menelaah perihal metode pengkajian tanda (Sobur, 2016). Fokus penelitian ini akan menelaah mengenai analisis isi pesan konferensi pers Ketika krisis relokasi Rempang berlangsung, melalui tiga level pola komunikasi yakni pembukaan, isi, dan penutupan konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam. Dalam mengkaji analisis isi pesan konferensi pers penulis akan memakai teori segitiga makna atau *triangle meaning* Peirce yang terdiri dari *representament (sign)*, *object*, dan *interpretant*. Peneliti akan melihat makna dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam”.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menemukan bahwasanya dalam konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” ter-gambarkan budaya patron yang lekat. Dalam budaya ini terlihat adanya ketergantungan dan hubungan hierarkis yang mendalam, dimana keputusan dan kebijakan sangat dipengaruhi oleh otoritas tertinggi. Penyampaian dukungan dari Presiden Jokowi pada konferensi pers ditujukan untuk memperkuat legitimasi dan otoritas Bahlil Lahadalia dalam mendorong investasi di Pulau Rempang. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi merangkap spokesperson Indonesia secara eksplisit, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah pendukung utama dalam proyek Rempang Eco City. Tentu saja hal ini memperlihatkan bahwa Bahlil Lahadalia tidak hanya menghindari tanggung jawab sendiri, tetapi juga menempatkan Presiden Jokowi sebagai penentu utama dalam kebijakan tersebut. Tindakan tersebut mencerminkan praktik pejabat yang menggunakan nama atau otoritas atasan mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam isu publik. Tingginya dukungan dari kalangan pemerintah dalam proyek Rempang Eco City yang dilabeli dengan ‘Investasi Ramah Lingkungan’ ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah dukungan itu benar berdasarkan komitmen terhadap prinsip-prinsip lingkungan atau hanya sekadar komunikasi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat. Kemudian timbullah efek samping yaitu munculnya skeptisisme mengenai orisinalitas niat pemerintah dalam mendukung proyek tersebut.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh Bahlil Lahadalia adalah dengan berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat akan tetapi, ada keraguan apakah strategi ini benar mencerminkan kepentingan rakyat atau hanya sekedar upaya untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai pejabat pemerintah. Di samping itu, tampaknya Bahlil Lahadalia berusaha mengarahkan narasi publik sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat mengurangi fungsi media sebagai pengamat independen. Perlu digarisbawahi bahwasanya kebebasan pers adalah pilar penting dalam demokrasi, yang memungkinkan masyarakat menerima informasi objektif dan beragam perspektif.

Keraguan juga muncul terkait pemahaman dan komitmen Bahlil Lahadalia terhadap proyek yang dipaparkan beliau pada konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam”. Jika seorang spokesperson terlihat ragu dan tidak sepenuhnya memahami proyek ini, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap efektivitas serta komitmen pemerintah dalam menjalankan

investasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam upaya membangun citra sebagai pemimpin yang jujur dan transparan, Bahlil Lahadalia menekankan keterbukaannya terhadap masyarakat dan media massa. Upaya yang dilakukan beliau dapat dipersepsikan sebagai strategi untuk membangun citra pemimpin yang jujur dan transparan. Selain membangun citranya sendiri, Bahlil Lahadalia juga berupaya melakukan pendekatan harmonis dan bersahabat dengan tujuan memperlihatkan niat baik Pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dapat diartikan penulis sebagai strategi Bahlil Lahadalia untuk mengurangi resistensi dan kritik publik.

Bahlil Lahadalia tak hanya menggunakan pendekatan harmonis dan bersahabat, akan tetapi ia juga mengimplementasikan pendekatan politik identitas untuk membangun interelasi dan simpati masyarakat. Dari sinilah kita dapat melihat tolak ukur kredibilitas seorang Bahlil Lahadalia. Kapabilitas Bahlil Lahadalia dalam menjawab pertanyaan media diharapkan memberikan kejelasan mengenai proyek yang dijalankan. Dengan begitu ia dapat membuktikan bahwasanya hilirisasi dalam proyek ini memang mempunyai potensi ekonomi. Proses hilirisasi dalam investasi ramah lingkungan juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak lingkungan dan manfaat bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah isu penting.

Ketidakterbukaan Bahlil Lahadalia terhadap media dan masyarakat menjadi kontradiksi dari pernyataan awalnya yang ingin bersikap terbuka. Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil Lahadalia membuat pernyataannya menjadi tidak eksplisit dengan tidak menyebutkan nama negara yang di isukan bersaing dengan Indonesia. Hal ini menandakan keterbatasan dalam transparansi yang beliau janjikan sebelumnya. Pada konferensi pers tersebut Bahlil Lahadalia membuat pernyataan yang terkesan meremehkan masyarakat yaitu “Tapi, mohon jangan rakyat kita dibuat informasi yang keliru gitu loh, nggak bagus kalau saya sih dapat memahami. Tapi, kasihan saudara-saudara saya di kampung, itu kira-kira bos.” Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah beliau sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia tidak memberikan kepastian perihal tanggal relokasi masyarakat Rempang. Ketidakpastian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Rempang menunjukkan ambiguitas dan kebingungan dalam kebijakan pemerintah, dampaknya adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bahlil Lahadalia sebagai spokesperson atau juru bicara dari Pemerintah Indonesia dalam konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam” memperlihatkan kekhawatirannya terkait pemberitaan media massa. Pemberitaan media massa menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam membentuk opini publik dan betapa rentannya kebijakan pemerintah terhadap kritik media. Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil Lahadalia berulang kali menekankan kepada media untuk tidak menggiring opini masyarakat dengan membuat berita yang tidak benar. Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers “Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang, Kota Batam”, terlihat bahwa pemerintah khawatir pemberitaan media massa yang tidak benar membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, berikut ini terdapat tabel dari hasil pembahasan yang penulis jabarkan.

TEKS	KONTEKS
Budaya Patron	Narasi yang disampaikan dalam Konferensi Pers tersebut menunjukkan adanya Budaya patron yang kental. Tergambar bahwa adanya hubungan hierarkis dan ketergantungan antara pejabat pemerintah dengan pemimpin tertinggi.
Investasi Ramah Lingkungan	Dengan embel-embel ‘Investasi Ramah Lingkungan’ para pejabat dari kalangan tertinggi sampai terendah beramai-ramai menyokong proyek <i>Rempang Eco City</i> . Tetapi, perlu diperhitungkan kembali apakah sokongan dari para pejabat ini merupakan tindakan nyata dalam mendukung prinsip-prinsip lingkungan, atau hanya sebatas retorika politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Menteri Investasi Investasi Terkesan Berpihak kepada Masyarakat	Strategi yang digunakan Bahlil Lahadalia ini mencerminkan upayanya untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai pejabat pemerintah. Namun, strategi tersebut apakah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau hanya sekadar strategi komunikasi politik Bahlil Lahadalia.

Ancaman terhadap Netralitas Media Massa	Bahlil Lahadalia tampaknya berusaha membatasi kebebasan pers dan mengarahkan narasi publik sesuai dengan kepentingan pemerintah. Tentu saja hal tersebut dapat mengurangi fungsi media sebagai pengamat independen yang memberikan informasi objektif dan beragam perspektif kepada masyarakat.
Keraguan terhadap Program Investasi Ramah Lingkungan	Jika seorang menteri terlihat ragu-ragu dan tidak sepenuhnya memahami program yang dipromosikan, hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap efektivitas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan investasi tersebut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Keterbukaan Menteri Investasi Indonesia terkait Program <i>Rempang Eco City</i>	Bahlil Lahadalia menekankan keinginannya untuk bersikap terbuka kepada masyarakat dan media massa. Beliau meminta kepada media untuk memberikan pertanyaan kritis untuk memastikan transparansi. Di sini Bahlil Lahadalia berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang jujur dan transparan.
Niat Baik Pemerintah Indonesia terhadap Masyarakat Rempang	Upaya Bahlil Lahadalia dalam menciptakan kesan harmonis dan bersahabat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, upaya tersebut bisa saja menjadi sebuah strategi untuk mengurangi resistensi dan kritik publik.
Menteri Investasi Indonesia menggunakan Politik Identitas	Dengan menggunakan politik identitas Bahlil Lahadalia berusaha membangun kedekatan dan simpati dengan masyarakat. Penggunaan politik identitas bisa efektif dalam menciptakan hubungan emosional dengan masyarakat, tetapi harus dinilai apakah hal tersebut disertai dengan kebijakan konkret yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau hanya simbolis belaka.
Kredibilitas Menteri Investasi Indonesia Dipertanyakan Masyarakat	Sebagai perwakilan pemerintah yang bertugas memberikan kejelasan mengenai program ini, diharapkan Bahlil Lahadalia mampu menjawab berbagai pertanyaan media tanpa terbatas oleh kewenangannya.
Investasi Ramah Lingkungan mendorong Hilirisasi	Proses hilirisasi mungkin dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, tetapi apakah proses tersebut benar-benar memperhatikan dampak lingkungan. Tindakan tersebut mendorong pertanyaan mengenai masyarakat setempat yang akan mendapat manfaat langsung dari hilirisasi ini.
Ketidakterbukaan Menteri Investasi Indonesia kepada Media Massa dan Masyarakat	Pernyataan Bahlil Lahadalia yang tidak secara eksplisit menyebut nama negara dalam konteks persaingan, serta upayanya untuk bermain aman, menandakan adanya keterbatasan dalam transparansi yang ia janjikan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang niatnya bersikap terbuka.
Menteri Investasi Indonesia yang Menganggap Remeh Masyarakat	Pernyataan Bahlil Lahadalia mencerminkan superioritas terhadap pengetahuan dan pemahaman informasi dibandingkan dengan masyarakat di daerah.
Ketidakpastian Pemerintah Indonesia dalam Membuat Keputusan Tanggal Relokasi Masyarakat Rempang	Dari pernyataan Bahlil Lahadalia dapat menimbulkan kesan ambigu serta ketidakpastian terhadap keputusan Pemerintah Indonesia yang dipersepsikan oleh masyarakat Rempang.
Kekhawatiran Menteri Investasi Indonesia terkait Pemberitaan Media Massa	Bahlil Lahadalia menyadari pemberitaan media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengiringan opini terhadap kinerjanya dan kekhawatirannya terkait pemberitaan yang tidak

tepat dapat berdampak negatif terhadap citra atau kebijakan yang dia buat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwasanya Menteri Investasi Indonesia yakni Bahlil Lahadalia menunjukkan tanda-tanda dan makna komunikasi pemerintah dalam konferensi pers yang terbagi menjadi tiga level pola komunikasi, yakni pembukaan, isi, dan penutupan konferensi pers. Pembukaan konferensi pers ditandai dengan Bahlil Lahadalia yang di awal konferensi pers tidak menunjukkan sikap simpati dan prihatinnya atas konflik yang terjadi antar masyarakat Rempang dan aparat keamanan gabungan. Faktanya ialah konferensi pers tersebut tidak diawali dengan pernyataan pemerintah yang turut menyesal dan ikut prihatin terkait peristiwa konflik tersebut. Melainkan, beliau langsung memaparkan hal-hal terkait dengan relokasi. Lalu, isi konferensi pers ditandai dengan Bahlil Lahadalia yang menunjukkan makna keraguan dalam konferensi pers tersebut. Makna keraguan tersebut ditunjukkan dengan Bahlil Lahadalia yang belum menguasai materi dari proyek Rempang Eco City. Dalam konferensi pers terlihat beberapa kali beliau bertanya kepada rekan-rekannya. Sebagai seorang spokesperson atau juru bicara Pemerintah Indonesia, beliau harus mampu menunjukkan kapabilitasnya dalam penguasaan materi proyek tersebut. Terakhir, penutupan konferensi pers ditandai dengan Bahlil Lahadalia menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau sangat ingin mengendalikan dan menguasai informasi yang media massa berikan kepada masyarakat. Beliau juga memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menjawab pertanyaan media massa. Begitu juga dengan transparansi yang dijanjikan beliau di awal konferensi pers menjadi kontradiktif dengan pernyataan yang enggan ia jawab, hal ini dapat memicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bahlil Lahadalia.

Saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah bisa menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan meneliti secara langsung dan mewawancarai masyarakat adat untuk mendapatkan indeks kepuasan terhadap konferensi pers yang dibuat oleh Bahlil Lahadalia. Penulis juga ingin memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia Ketika menangani kasus komunikasi krisis seperti ini, lebih menggunakan Bahasa yang efektif dan dialog yang mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Merancang kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berpihak kepada masyarakat serta tidak melakukan tindakan represif yang merugikan masyarakat. Terakhir, penulis berharap ketika memberikan informasi atau menjalankan suatu kebijakan, pemerintah lebih transparan/terbuka dalam menyampaikannya.

REFERENSI

- Andung, P. A., Messakh, J. J., & Doko, M. M. (2023). *Komunikasi Bencana: Konsep, Teori & Praktik Baik Berbasis Kearifan Lokal*. Zifatama Jawa.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Arisanti, W. (2019). *Analisis Makna Cantik Dalam Video Youtube Tasya Farasya "7 Hari No Makeup Challenge!" Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce* [Skripsi]. Universitas Telkom.
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). RESISTENSI BERBASIS ADAT: PERLAWANAN MASYARAKAT PULAU REMPANG, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035–1041.
- Baun, P. J. (2022). Konflik Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat Helong dalam Kebijakan Pembangunan Bendungan Kolhua 2010-2022. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 9211–9223. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9835>
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130–140. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i2.4071>
- Martianto, R. W. U., & Toni, A. (2021). ANALISIS SEMIOTIKA GAYA KOMUNIKASI MILENIAL BAMBANG SOESATYO MELALUI YOUTUBE PODCAST. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 13–28. <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JEP/index>
- Nova, F. (2009). *Crisis Public Relations Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Grasindo.
- Prastya, N. M. (2011). Komunikasi Krisis di Era New Media dan Social Media. *Jurnal Komunikasi, Volume 6, Nomor 1*.

- Pratiwi, V. P., Rahmawati, D. E., & Purwaningsih, T. (2021). Akun Twitter BNPB_RI Sebagai Media Komunikasi Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 212–226. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.16116>
- Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Deepublish.
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan*. Refika.
- Silviani, I. (2020). *Public Relations sebagai Solusi Komunikasi Krisis* (I. Silviani, Ed.). SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Sobur, A. (2016). *Semiotika Komunikasi*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Susetya, K. D. A. (2020). *Gaya Komunikasi Calon Pemimpin Negara di Media Sosial Sebelum dan Sesudah Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Multimodal pada Foto dalam Akun Instagram @sandiuno)* [Skripsi]. Universitas Telkom.
- Syam, H., Azman, & Yanuar, D. (2022). *KOMUNIKASI KRISIS STRATEGI MENJAGA REPUTASI BAGI ORGANISASI PEMERINTAH*.

